



STATISTIK DATA ASN

Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

Periode Juni 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Buku Statistik Data ASN Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN periode Juni 2025 ini dapat diselesaikan guna pengembangan, pengelolaan, penyediaan data dan teknologi informasi serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen kepegawaian dalam menyelenggarakan fungsinya.

Sumber data dalam penyusunan Buku Statistik Data ASN Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN periode Juni 2025 ini berasal dari basis data pada aplikasi SIASN yang dimiliki BKN dimana penyajian datanya diambil dalam satuan tingkat wilayah Kantor Regional XII BKN dengan rincian berdasarkan masing – masing daerah kabupaten / kota pada tiga Provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik data dan informasi maupun saran dan arahan yang positif dalam penyusunan buku ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, diharapkan saran dan kritik yang dapat meningkatkan kualitas data dan informasi dari buku statistik ini. Kami berharap Buku Statistik Data ASN Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN periode Juni 2025 ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak terkait yang membutuhkan.



Purjiyanta, SH., M.Hum

Kepala Kantor Regional XII BKN

DAFTAR ISI

Jumlah PNS Daerah

1

Jumlah PPPK Daerah

4

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jumlah ASN Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin	
a. Wilayah Provinsi Riau	7
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	7
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	8
2. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	
a. Wilayah Provinsi Riau	8
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	9
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	10
3. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	
a. Wilayah Provinsi Riau	10
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	11
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	12
4. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan	
a. Wilayah Provinsi Riau	13
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	13
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	14
5. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia	
a. Wilayah Provinsi Riau	15
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	15
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	16

DAFTAR TABEL

Halaman

6. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia	
a. Wilayah Provinsi Riau	17
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	18
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	19
7. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	
a. Wilayah Provinsi Riau	20
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	21
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	24
8. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	
a. Wilayah Provinsi Riau	25
b. Wilayah Provinsi Sumatera Barat	27
c. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	29
9. Jumlah PNS Jabatan Fungsional Tertentu	31
10. Jumlah PPPK Jabatan Fungsional Tertentu	32
11. Jumlah PNS Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kesehatan	33

JUMLAH PNS DAERAH

Perubahan angka Jumlah ASN Daerah Aktif

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengadaan ASN, ASN pensiun, ASN meninggal dunia pindah instansi, dan ASN yang terkena hukuman disiplin.

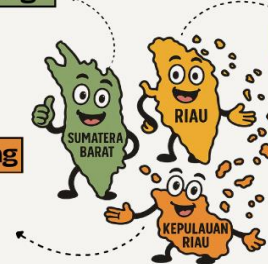
Jumlah PNS per Wilayah Provinsi

Jumlah PNS : 85.428 orang

Kenaikan sebesar 1,43 %
(1.204 orang) dari Des-2024

Jumlah PNS : 74.021 orang

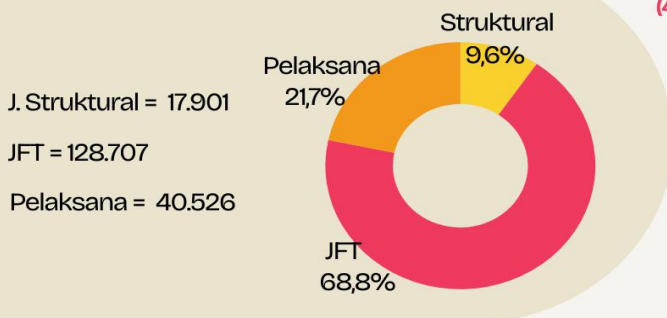
Kenaikan sebesar 0,054 %
(40 orang) dari Des-2024



Jumlah PNS : 27.686 orang

Kenaikan sebesar 1,7 %
(482 orang) dari Des-2024

Berdasarkan Kelompok Jabatan



Berdasarkan Jenis Kelamin



187.135 Orang

Jumlah PNS Daerah per 30 Juni 2025

Jumlah PNS naik sebesar 0,009 %
(1.723 orang) dari jumlah PNS pada
periode Desember 2024

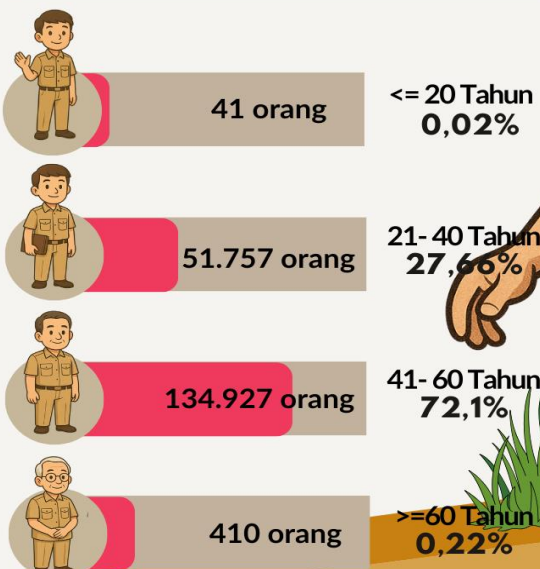
Jumlah PNS terbanyak :

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (15.573 orang)

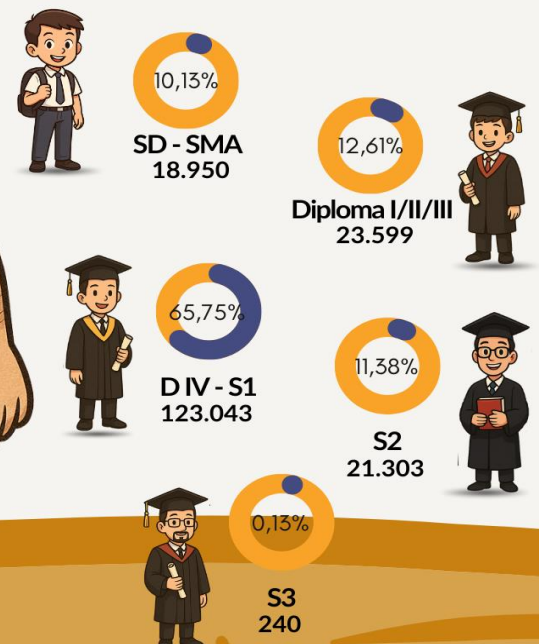
Jumlah PNS terkecil :

Pemerintah Kota Padang Panjang (1.749 orang)

Berdasarkan Kelompok Usia

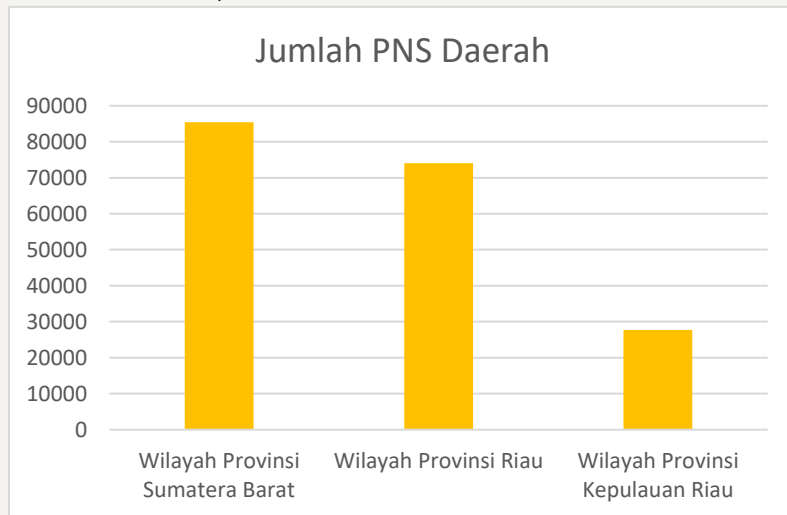


Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN tercatat sebanyak 187.135 orang. Angka ini memiliki bobot yang sangat signifikan, karena merupakan bagian terbesar dari total keseluruhan PNS (baik Pusat maupun Daerah) di wilayah kerja Kanreg XII BKN. Dominasi PNS Daerah ini sejalan dengan karakteristik pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, di mana sebagian besar urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah. Dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan PNS Pusat, PNS Daerah menjadi tulang punggung dalam menjalankan fungsi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, pekerjaan umum, serta layanan sosial. Artinya, besarnya porsi PNS daerah tidak hanya mencerminkan kebutuhan yang tinggi di lapangan, tetapi juga menggambarkan posisi strategis mereka dalam menopang keberlangsungan pembangunan di daerah.

1. Berdasarkan Wilayah



Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di wilayah kerja Kanreg XII BKN tersebar pada tiga provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau. Dari ketiga provinsi tersebut, Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah PNS daerah terbanyak, yaitu sebanyak 85.428 orang (mengalami kenaikan sebesar 1.43% atau sebanyak 1.024 orang dibanding Desember 2024). Selanjutnya, Provinsi Riau menempati posisi kedua dengan jumlah 74.021 orang, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah PNS daerah sebanyak 27.686 orang.

Jika ditinjau lebih rinci pada tingkat instansi kabupaten/kota, jumlah PNS daerah terbanyak terdapat di **Provinsi Sumatera Barat** dengan total **15.573 orang**. Sementara itu, jumlah PNS daerah paling sedikit tercatat di **Kota Padang Panjang** dengan jumlah **1.749 orang**. Sebaran ini menunjukkan bahwa distribusi PNS daerah tidak merata di setiap wilayah, melainkan sangat dipengaruhi oleh luas wilayah, jumlah penduduk, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi gender dalam PNS Daerah menunjukkan disparitas yang cukup mencolok dan mengundang analisis lebih lanjut. Jumlah PNS perempuan (119.820 orang) secara absolut hampir dua kali lipat dari jumlah PNS laki-laki (67.315 orang), dengan proporsi 64.03% berbanding 35.97%. Dominasi perempuan ini dapat merefleksikan beberapa hal: (1) tingginya partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor publik, (2) mungkin adanya preferensi atau kinerja yang lebih unggul dalam proses seleksi CPNS, atau (3) jenis pekerjaan di pemerintahan daerah yang banyak tersedia di bidang-bidang yang secara stereotip didominasi perempuan, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Namun, perlu analisis lebih mendalam untuk melihat representasi gender ini pada jabatan-jabatan strategis dan eselon tinggi.

3. Berdasarkan Kelompok Jabatan

Komposisi jabatan menunjukkan bahwa sebagian besar PNS Daerah, yaitu 128.707 orang (68.78%), berada pada Jabatan Fungsional. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang ingin memperkuat peran ahli dan teknis. Jabatan Pelaksana menempati urutan kedua dengan 40.527 orang (21.66%), sementara Jabatan Struktural (jabatan kepemimpinan/manajerial) hanya diisi oleh 17.901 orang (9.57%). Rasio ini menunjukkan struktur birokrasi yang relatif ramping dalam hal jumlah posisi pimpinan, yang secara teori dapat mempermudah koordinasi dan pengambilan keputusan.

4. Berdasarkan Kelompok Usia

Struktur usia PNS Daerah menggambarkan sebuah birokrasi yang sangat matang dan kaya akan pengalaman. Mayoritas mutlak, yaitu 72.10% atau 134.927 orang, berada dalam kelompok usia 41 - 60 tahun. Kelompok ini merupakan tulang punggung organisasi yang berada di puncak karier dan produktivitasnya. Sementara itu, kelompok usia muda (21 - 40 tahun) yang merupakan agen perubahan dan regenerasi berjumlah 51.757 orang (27.66%). Komposisi ini menunjukkan potensi tantangan besar dalam beberapa tahun ke depan, yaitu gelombang pensiun massal yang sangat besar dari kelompok 41-60 tahun. Jumlah PNS yang sangat kecil di kelompok usia 17-20 tahun (41 orang, 0.02%) dan yang mendekati pensiun (≥ 61 tahun, 410 orang, 0.22%) mengindikasikan bahwa proses regenerasi dan program pengadaan CPNS perlu dipersiapkan dan diperkuat secara strategis untuk mengantisipasi kekosongan dan kehilangan pengetahuan (knowledge loss) yang masif.

5. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD-SMA	18.950	10.13%
2.	Diploma I - Diploma III	23.599	12,61%
3.	Diploma IV / Strata I	123.043	65,75%
4.	Strata II	21.303	11,38%
5.	Strata III	240	0,13%

Tingkat pendidikan PNS Daerah mencerminkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berhasil. Sebanyak 77.26% total PNS telah menempuh pendidikan tinggi, ditunjukkan oleh jumlah pemegang gelar DIV/S1 (123.043 orang, 65.75%) dan S2 (21.303 orang, 11.38%). Ini adalah indikator positif untuk kapasitas analisis dan pelayanan birokrasi. Namun, masih terdapat 10.13% atau 18.950 orang dengan latar belakang pendidikan SMA/ sederajat ke bawah, yang kemungkinan besar menempati posisi pelaksana. Yang menarik, jumlah pemegang gelar S3 masih sangat kecil, yaitu 240 orang (0.13%). Hal ini dapat mencerminkan kurangnya insentif atau kebutuhan untuk kualifikasi setinggi itu di tingkat daerah, atau mungkin juga adanya brain drain dimana para doktor lebih memilih berkarir di pusat atau sektor swasta/akademik.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa tantangan dan rekomendasi strategis yang dapat diidentifikasi:

- Regenerasi ASN: Pemerintah Daerah harus segera merancang peta jalan (*roadmap*) regenerasi ASN yang komprehensif, termasuk perencanaan pengadaan CPNS yang masif dan terukur, program knowledge management, dan mentorship untuk memastikan transfer ilmu dari generasi senior ke junior berjalan efektif.
- Manajemen Talenta: Perlunya program pengembangan kepemimpinan (*leadership development*) dan manajemen talenta yang agresif untuk menyiapkan calon-calon pemangku jabatan struktural dari dalam, mengingat jumlahnya yang tidak banyak.
- Peningkatan Kapasitas: Program beasiswa dan pendukung penyelesaian pendidikan S2/S3 perlu terus didorong untuk meningkatkan kapasitas analisis kebijakan dan inovasi pelayanan publik, sekaligus mempersiapkan calon pemimpin dan ahli masa depan.

Profil PNS Daerah saat ini adalah gambaran sebuah birokrasi yang berpengalaman, terdidik, dan didominasi oleh tenaga fungsional serta perempuan. Namun, di balik kekuatan tersebut, tersimpan tantangan eksistensial berupa ancaman pensiun massal dalam waktu dekat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola transisi ini melalui perencanaan SDM yang visioner akan sangat menentukan kualitas governance dan pelayanan publik di masa yang akan datang.

JUMLAH PPPK DAERAH

105.578 orang

Jumlah PPPK Daerah per 30 Juni 2025

Jumlah PPPK Daerah per Instansi



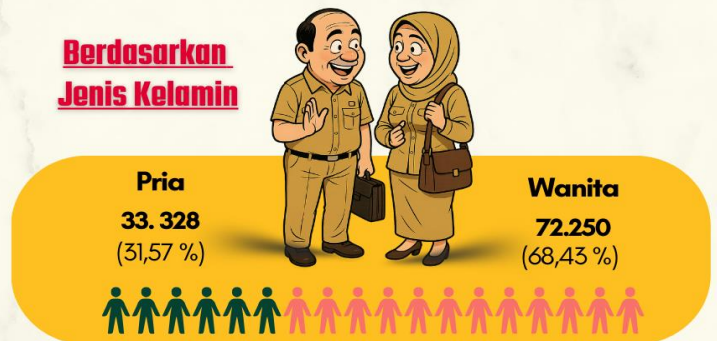
Jumlah PPPK terbanyak :

Pemerintah Provinsi Riau (8.918 orang)

Jumlah PPPK terkecil :

Pemerintah Kab. Solok Selatan (286 orang)

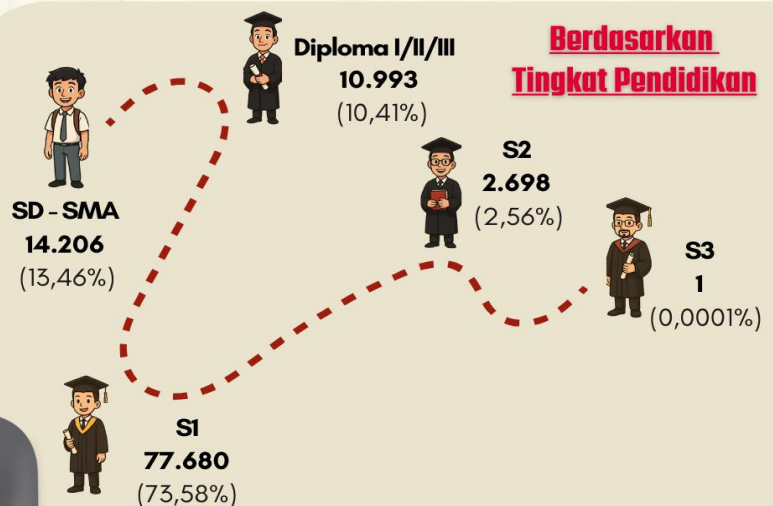
Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Kelompok Usia



Berdasarkan Tingkat Pendidikan



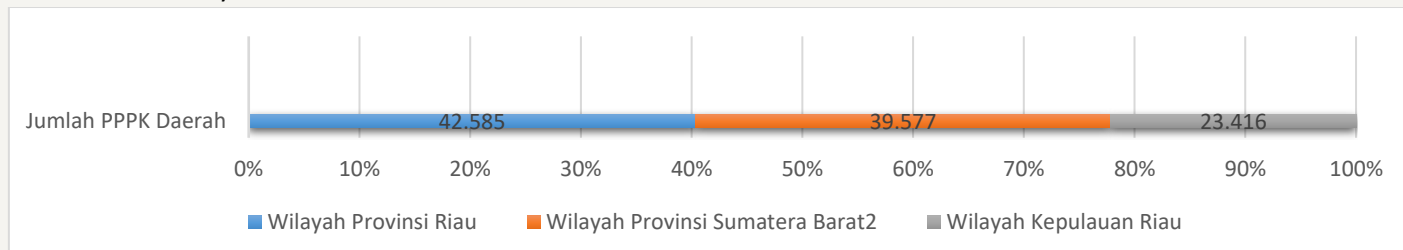
Berdasarkan Tingkat Golongan



Jumlah kelompok PNS dengan golongan IX mendominasi pada jumlah kelompok tingkat golongan

Total populasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Juni 2025 adalah 105.578 orang. Angka ini memberikan gambaran bahwa keberadaan PPPK telah menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan tenaga aparatur di sektor pelayanan publik yang terus meningkat. Distribusi tenaga PPPK ini tidak merata di ketiga provinsi, mencerminkan variasi kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

1. Berdasarkan Wilayah



Jika dilihat dari distribusi provinsi, komposisi terbesar terdapat di Provinsi Riau dengan 42.585 orang atau sekitar 40,4% dari total keseluruhan PPPK di wilayah kerja Kanreg XII. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat memiliki 39.577 orang (37,5%), sedangkan Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan 23.416 orang (22,2%). Hal ini menunjukkan bahwa Riau dan Sumatera Barat menjadi dua wilayah dengan konsentrasi tenaga PPPK yang tinggi, sejalan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, serta kebutuhan pelayanan dasar yang relatif lebih besar dibandingkan Kepulauan Riau.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari perspektif jenis kelamin, data memperlihatkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok. Jumlah PPPK perempuan tercatat sebanyak 72.250 orang atau 68,43%, jauh lebih tinggi dibandingkan PPPK laki-laki yang hanya berjumlah 33.328 orang atau 31,57%. Dominasi tenaga kerja perempuan ini mengindikasikan bahwa formasi PPPK di daerah banyak terisi oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, yang memang secara nasional cenderung didominasi oleh perempuan. Temuan ini juga memberi gambaran bahwa peran perempuan dalam birokrasi daerah semakin kuat dan signifikan, khususnya pada sektor-sektor yang bersifat pelayanan publik langsung.

3. Berdasarkan Golongan Jabatan

Berdasarkan golongan jabatan, sebagian besar PPPK di wilayah kerja Kanreg XII berada pada Golongan IX, dengan jumlah mencapai 77.670 orang atau sekitar 73,6% dari keseluruhan. Hal ini dapat dimaknai bahwa mayoritas PPPK yang diangkat merupakan tenaga fungsional, terutama guru, mengingat formasi PPPK dalam beberapa tahun terakhir banyak dialokasikan untuk tenaga pendidik. Selain itu, terdapat 13.578 orang pada Golongan V (12,9%), 10.991 orang pada Golongan VII (10,4%), serta jumlah yang relatif kecil pada golongan lainnya seperti Golongan I (322 orang), Golongan IV (307 orang), dan Golongan VI (1 orang). Distribusi ini kembali menegaskan bahwa formasi PPPK difokuskan pada sektor pendidikan, di mana jabatan fungsional guru sebagian besar memang berada di golongan tinggi sesuai kualifikasi pendidikan.

4. Berdasarkan Usia

Profil usia P3K menggambarkan sebuah populasi yang sangat produktif dan berada di puncak kapasitas kerjanya:

- Kelompok usia 31- 40 tahun adalah yang terbesar, dengan 55.670 orang (52.73%). Kelompok ini merupakan inti dari tenaga kerja yang memiliki kombinasi ideal antara energi, pengalaman, dan potensi pengembangan.
- Kelompok usia 21-30 tahun berjumlah 18.905 orang (17.91%), merepresentasikan tenaga muda yang baru memasuki dunia kerja dan membawa perspektif serta inovasi baru.
- Kelompok usia 41-50 tahun berjumlah 25.485 orang (24.14%), merupakan tenaga senior yang kaya pengalaman dan stabil.

- Kelompok usia 51-60 tahun berjumlah 5.496 orang (5.21%), dan usia 60+ hanya 22 orang (0.02%).
- Komposisi ini menunjukkan bahwa 95.78% tenaga P3K berusia di bawah 50 tahun, menciptakan sebuah birokrasi yang energik, dinamis, dan memiliki masa tunggu karier yang masih panjang.

5. Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan P3K Daerah tergolong tinggi, yang merupakan indikator positif bagi kapasitas birokrasi.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD-SMA	14.206	13,46%
2.	Diploma I - Diploma III	10.993	10,41%
3.	Diploma IV / Strata I	77.680	73,58%
4.	Strata II	2.698	2.56%
5.	Strata III	1	0,0001%

- Pendidikan Strata-1 (S1) merupakan kelompok terbesar mutlak dengan 77.680 orang (73,58%). Hal ini mencerminkan standar rekrutmen yang ketat dan keinginan pemerintah daerah untuk merekrut tenaga terdidik.
- Pendidikan Diploma III menempati urutan kedua dengan 10.991 orang (10.41%), yang biasanya untuk posisi-posisi teknis dan terampil.
- Pendidikan Strata-2 (S2) berjumlah 2.698 orang (2.56%), menunjukkan adanya tenaga ahli dan calon pemimpin dengan kapasitas analitis yang lebih dalam.
- Pendidikan SMA/Sederajat (SD, SMP, SMA) secara keseluruhan berjumlah 14.206 orang (13.46%), yang kemungkinan besar menempati posisi pelaksana atau tenaga operasional.
- Pendidikan Strata-3 (S3) dan Diploma I/II jumlahnya sangat minimal (masing-masing 1 orang), mengindikasikan bahwa sangat sedikit lowongan P3K yang membutuhkan kualifikasi doktor atau bahwa pemegang gelar doktor lebih memilih jalur karir lain.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa keberadaan PPPK di wilayah kerja Kanreg XII BKN bukan hanya pelengkap, melainkan sudah menjadi komponen strategis dalam struktur aparatur daerah. Dominasi jumlah di sektor pendidikan dan kesehatan memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memanfaatkan kebijakan PPPK untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam memperkuat pelayanan dasar. Dengan jumlah yang besar, penyusunan kebijakan manajemen PPPK - mulai dari perencanaan formasi, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, hingga perlindungan hak dan kesejahteraan harus dilakukan secara lebih sistematis, agar keberadaan mereka benar-benar mampu mendorong peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di daerah.

TABEL PENYAJIAN DATA

1. Jumlah ASN Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	PNS			PPPK			TOTAL ASN
	PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
Pemerintah Provinsi Riau	5.686	7.611	13.297	2.918	6.000	8.918	22.215
Pemerintah Kab. Kampar	2.443	4.161	6.604	2.234	4.460	6.694	13.298
Pemerintah Kab. Bengkalis	2.107	3.761	5.868	906	2.629	3.535	9.403
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	1.765	2.899	4.664	542	1.907	2.449	7.113
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2.496	3.807	6.303	505	1.624	2.129	8.432
Pemerintah Kab. Pelalawan	1.708	2.464	4.172	342	1.029	1.371	5.543
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	1.902	3.131	5.033	926	2.492	3.418	8.451
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	2.178	3.468	5.646	743	2.327	3.070	8.716
Pemerintah Kab. Siak	1.995	3.149	5.144	984	2.407	3.391	8.535
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	1.728	2.792	4.520	415	1.292	1.707	6.227
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	1.182	1.549	2.731	309	710	1.019	3.750
Pemerintah Kota Pekanbaru	1.917	4.183	6.100	427	1.282	1.709	7.809
Pemerintah Kota Dumai	1.291	2.648	3.939	983	2.192	3.175	7.114
TOTAL	28.398	45.623	74.021	12.234	30.351	42.585	116.606

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	PNS			PPPK			TOTAL ASN
	PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	5.403	10.170	15.573	1.530	4.055	5.585	21.158
Pemerintah Kab. Agam	1.305	3.670	4.975	537	2.159	2.696	7.671
Pemerintah Kab. Pasaman	1.155	2.307	3.462	439	1.590	2.029	5.491
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	1.606	3.978	5.584	497	1.547	2.044	7.628
Pemerintah Kab. Solok	1.365	3.127	4.492	362	1.238	1.600	6.092
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	1.290	3.708	4.998	648	1.625	2.273	7.271
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	1.563	3.545	5.108	742	2.968	3.710	8.818
Pemerintah Kab. Tanah Datar	1.132	2.988	4.120	362	1.278	1.640	5.760
Pemerintah Kab. Sijunjung	1.330	2.882	4.212	274	1.255	1.529	5.741
Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	1.104	1.239	2.343	565	887	1.452	3.795
Pemerintah Kab. Solok Selatan	922	2.206	3.128	78	208	286	3.414
Pemerintah Kab. Dharmasraya	925	2.145	3.070	352	1.507	1.859	4.929
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	1.228	2.943	4.171	698	2.162	2.860	7.031
Pemerintah Kota Bukittinggi	785	1.503	2.288	244	411	655	2.943

INSTANSI	PNS			PPPK			TOTAL ASN
	PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
Pemerintah Kota Padang Panjang	644	1.105	1.749	106	214	320	2.069
Pemerintah Kota Sawahlunto	628	1.295	1.923	246	650	896	2.819
Pemerintah Kota Solok	684	1.273	1.957	79	255	334	2.291
Pemerintah Kota Padang	2.071	5.169	7.240	2.245	3.961	6.206	13.446
Pemerintah Kota Payakumbuh	783	1.733	2.516	249	545	794	3.310
Pemerintah Kota Pariaman	822	1.697	2.519	419	390	809	3.328
TOTAL	26.745	58.683	85.428	10.672	28.905	39.577	125.005

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	PNS			PPPK			TOTAL ASN
	PRIA	WANITA	JUMLAH	PRIA	WANITA	JUMLAH	
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2.251	2.618	4.869	2.881	2.759	5.640	10.509
Pemerintah Kab. Bintan	1.318	1.770	3.088	837	1.155	1.992	5.080
Pemerintah Kab. Karimun	1.571	2.144	3.715	1.204	1.726	2.930	6.645
Pemerintah Kab. Natuna	1.469	1.334	2.803	502	870	1.372	4.175
Pemerintah Kab. Lingga	1.375	1.657	3.032	817	944	1.761	4.793
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	853	969	1.822	1.017	1.426	2.443	4.265
Pemerintah Kota Batam	2.214	3.290	5.504	2.581	3.187	5.768	11.272
Pemerintah Kota Tanjungpinang	1.121	1.732	2.853	583	927	1.510	4.363
TOTAL	12.172	15.514	27.686	10.422	12.994	23.416	51.102

2. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Riau	17	2	575	341	3.473	4.703	1.621	2.565
Pemerintah Kab. Kampar	17	2	294	175	1.392	2.649	740	1.335
Pemerintah Kab. Bengkalis	16	1	384	257	1.343	2.842	364	661
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	7	2	326	243	1.149	2.147	283	507
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	21	1	402	262	1.527	2.567	546	977
Pemerintah Kab. Pelalawan	8	1	232	129	1.085	1.792	383	542
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	9	1	333	300	1.179	2.317	381	513
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	18	3	495	316	1.351	2.695	314	454
Pemerintah Kab. Siak	19	1	349	185	1.267	2.399	360	564

INSTANSI	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	12	2	235	234	1.028	1.803	453	753
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	7	0	219	243	822	1.176	134	130
Pemerintah Kota Pekanbaru	7	1	256	194	1.327	2.889	327	1.099
Pemerintah Kota Dumai	8	0	158	208	904	2.057	221	383
TOTAL	166	17	4.258	3.087	17.847	32.036	6.127	10.483

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	28	3	587	668	3.239	5.960	1.549	3.539
Pemerintah Kab. Agam	20	1	213	222	737	2.337	335	1.110
Pemerintah Kab. Pasaman	19	0	145	200	623	1.425	368	682
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	13	0	224	331	999	2.859	370	788
Pemerintah Kab. Solok	9	0	173	219	798	2.164	385	744
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	16	1	164	380	700	2.034	410	1.293
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5	1	166	288	857	2.099	535	1.157
Pemerintah Kab. Tanah Datar	8	2	142	244	696	1.976	286	766
Pemerintah Kab. Sijunjung	3	0	279	454	869	2.101	179	327
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	11	0	248	167	683	953	162	119
Pemerintah Kab. Solok Selatan	3	1	126	304	636	1.642	157	259
Pemerintah Kab. Dharmasraya	8	0	112	170	571	1.626	234	349
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2	1	128	175	768	2.180	330	587
Pemerintah Kota Bukittinggi	7	0	164	149	483	1.026	131	328
Pemerintah Kota Padang Panjang	6	1	89	90	441	845	108	169
Pemerintah Kota Sawahlunto	0	0	87	129	422	920	119	246
Pemerintah Kota Solok	3	0	74	77	469	864	138	332
Pemerintah Kota Padang	28	0	412	457	1.302	3.402	329	1.310
Pemerintah Kota Payakumbuh	6	0	128	98	482	1.263	167	372
Pemerintah Kota Pariaman	3	0	113	247	570	1.123	136	327

INSTANSI	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
TOTAL	198	11	3.774	5.069	16.345	38.799	6.428	14.804

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	6	0	223	151	1.576	2.076	446	391
Pemerintah Kab. Bintan	5	0	244	252	880	1.264	189	254
Pemerintah Kab. Karimun	20	4	356	243	964	1.659	231	238
Pemerintah Kab. Natuna	12	0	242	158	1.033	1.092	182	84
Pemerintah Kab. Lingga	12	4	225	223	961	1.299	177	131
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	3	0	135	204	634	726	81	39
Pemerintah Kota Batam	12	0	287	249	1.612	2.497	303	544
Pemerintah Kota Tanjungpinang	1	0	156	139	817	1.308	147	285
TOTAL	71	8	1.868	1.619	8.477	11.921	1.756	1.966

3. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	Gol.I		Gol.IV		Gol.V		Gol.VI		Gol.VII		Gol.IX		Gol.X		Gol.XI	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
Pemerintah Provinsi Riau	0	0	0	0	18	9	0	0	38	142	2.818	5.740	42	104	0	0
Pemerintah Kab. Kampar	6	2	10	2	814	409	0	0	78	346	1.286	3.596	40	105	0	0
Pemerintah Kab. Bengkalis	0	0	0	0	44	2	0	0	96	367	709	2.109	57	150	0	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	0	0	0	0	5	1	0	0	44	168	482	1.697	11	40	0	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	0	6	0	0	0	9	18	484	1.586	6	20	0	0
Pemerintah Kab. Pelalawan	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33	330	967	8	29	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	0	0	0	0	74	17	0	0	82	347	734	2.044	36	84	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	0	0	0	0	39	4	0	0	70	410	592	1.792	42	121	0	0
Pemerintah Kab. Siak	0	0	0	0	242	86	0	0	74	490	631	1.734	37	97	0	0
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	0	13	4	0	0	17	137	378	1.122	7	29	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0	0	0	0	34	201	265	471	10	38	0	0
Pemerintah Kota Pekanbaru	0	0	2	0	43	12	0	0	18	51	356	1.208	8	11	0	0
Pemerintah Kota Dumai	10	3	0	0	444	368	0	0	116	537	390	1.222	23	62	0	0
TOTAL	16	5	12	2	1.742	912	0	0	680	3.247	9.455	25.288	327	890	0	0

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	Gol.I		Gol.IV		Gol.V		Gol.VI		Gol.VII		Gol.IX		Gol.X		Gol.XI	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	0	13	4	0	0	68	258	1.419	3.730	30	63	0	0
Pemerintah Kab. Agam	12	0	0	0	88	66	0	0	46	267	376	1.775	15	51	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman	0	0	0	0	10	2	0	0	54	287	355	1.240	20	60	0	0
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	0	0	2	0	144	80	0	0	32	95	317	1.368	2	4	0	0
Pemerintah Kab. Solok	2	0	19	3	30	37	1	0	26	113	283	1.064	1	21	0	0
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	0	0	1	0	152	68	0	0	24	82	469	1.466	2	9	0	0
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	0	0	0	0	19	12	0	0	66	462	630	2.374	27	119	0	1
Pemerintah Kab. Tanah Datar	1	0	1	0	34	7	0	0	31	170	287	1.082	8	19	0	0
Pemerintah Kab. Sijunjung	0	0	0	0	8	1	0	0	34	243	220	955	12	56	0	0
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2	0	11	0	123	63	0	0	97	298	322	496	10	30	0	0
Pemerintah Kab. Solok Selatan	0	0	0	0	10	1	0	0	2	1	66	206	0	0	0	0
Pemerintah Kab. Dharmasraya	0	0	0	0	40	13	0	0	41	397	245	983	26	114	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	0	0	3	3	302	368	0	0	15	149	365	1.570	13	72	0	0
Pemerintah Kota Bukittinggi	4	1	1	0	116	44	0	0	21	74	92	255	10	37	0	0
Pemerintah Kota Padang Panjang	0	0	3	1	41	23	0	0	21	79	36	95	5	16	0	0

INSTANSI	Gol.I		Gol.IV		Gol.V		Gol.VI		Gol.VII		Gol.IX		Gol.X		Gol.XI	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
Pemerintah Kota Sawahlunto	5	6	0	0	77	30	0	0	43	202	117	367	4	45	0	0
Pemerintah Kota Solok	0	0	0	0	0	0	0	0	9	57	68	186	2	12	0	0
Pemerintah Kota Padang	77	4	91	5	953	328	0	0	116	509	998	3.052	10	63	0	0
Pemerintah Kota Payakumbuh	0	0	0	0	73	39	0	0	66	100	96	373	14	33	0	0
Pemerintah Kota Pariaman	4	0	7	2	282	82	0	0	10	15	116	291	0	0	0	0
TOTAL	107	11	139	14	2.515	1.268	1	0	822	3.858	6.877	22.928	211	824	0	1

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	Gol.I		Gol.IV		Gol.V		Gol.VI		Gol.VII		Gol.IX		Gol.X		Gol.XI	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	34	5	60	26	1.041	444	0	0	113	238	1.616	1.986	17	60	0	0
Pemerintah Kab. Bintan	33	6	0	0	423	248	0	0	60	203	313	670	8	28	0	0
Pemerintah Kab. Karimun	8	0	5	1	582	414	0	0	62	214	542	1.075	5	22	0	0
Pemerintah Kab. Natuna	1	0	6	1	158	117	0	0	64	246	249	467	24	39	0	0
Pemerintah Kab. Lingga	8	3	14	2	490	311	0	0	45	197	247	411	13	20	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	21	6	0	0	547	592	0	0	33	140	408	674	8	14	0	0
Pemerintah Kota Batam	42	13	14	5	1.077	297	0	0	135	455	1.271	2.317	42	100	0	0
Pemerintah Kota Tanjungpinang	3	0	6	0	259	141	0	0	49	130	261	615	5	41	0	0
TOTAL	150	33	105	35	4.577	2.564	0	0	561	1.823	4.907	8.215	122	324	0	0

4. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Riau	487	190	2.804	5.453	2.395	1.968
Pemerintah Kab. Kampar	285	113	1.466	3.641	692	407
Pemerintah Kab. Bengkalis	413	211	847	2.916	847	634
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	273	177	827	2.200	665	522
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	437	195	1.316	3.136	743	476
Pemerintah Kab. Pelalawan	320	154	876	1.945	512	365
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	284	140	1.037	2.550	581	441
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	322	165	1.033	2.730	823	573
Pemerintah Kab. Siak	336	137	908	2.490	751	522
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	247	117	1.003	2.271	478	404
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	234	85	558	1.138	390	326
Pemerintah Kota Pekanbaru	461	311	715	3.253	741	619
Pemerintah Kota Dumai	343	233	533	2.030	415	385
TOTAL	4.442	2.228	13.923	35.753	10.033	7.642

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	498	302	3.193	8.201	1.712	1.667
Pemerintah Kab. Agam	200	132	703	3.245	402	293
Pemerintah Kab. Pasaman	201	131	583	1.927	371	249

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	226	162	983	3.537	397	279
Pemerintah Kab. Solok	221	143	822	2.777	322	207
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	226	173	746	3.314	318	221
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	218	178	958	3.041	387	326
Pemerintah Kab. Tanah Datar	198	161	609	2.493	325	334
Pemerintah Kab. Sijunjung	196	144	810	2.473	324	265
Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	164	88	491	845	449	306
Pemerintah Kab. Solok Selatan	130	81	471	1.706	321	419
Pemerintah Kab. Dharmasraya	151	103	565	1.860	209	182
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	233	170	661	2.470	334	303
Pemerintah Kota Bukittinggi	198	189	212	973	375	341
Pemerintah Kota Padang Panjang	144	92	221	795	279	218
Pemerintah Kota Sawahlunto	158	126	264	950	206	219
Pemerintah Kota Solok	161	132	281	900	242	241
Pemerintah Kota Padang	466	411	865	4.190	740	568
Pemerintah Kota Payakumbuh	238	223	309	1.282	236	228
Pemerintah Kota Pariaman	145	92	345	1.189	332	416
TOTAL	4.372	3.233	14.092	48.168	8.281	7.282

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	341	157	1.283	1.878	627	583
Pemerintah Kab. Bintan	277	170	589	1.244	452	356
Pemerintah Kab. Karimun	337	178	701	1.546	533	420

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Natuna	305	105	649	920	515	309
Pemerintah Kab. Lingga	238	98	726	1.243	411	316
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	201	87	403	689	249	193
Pemerintah Kota Batam	486	275	967	2.319	761	696
Pemerintah Kota Tanjungpinang	224	147	479	1.135	418	450
TOTAL	2.409	1.217	5.797	10.974	3.966	3.323

5. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Riau	487	190	2.804	5.453	2.395	1.968
Pemerintah Kab. Kampar	285	113	1.466	3.641	692	407
Pemerintah Kab. Bengkalis	413	211	847	2.916	847	634
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	273	177	827	2.200	665	522
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	437	195	1.316	3.136	743	476
Pemerintah Kab. Pelalawan	320	154	876	1.945	512	365
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	284	140	1.037	2.550	581	441
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	322	165	1.033	2.730	823	573
Pemerintah Kab. Siak	336	137	908	2.490	751	522
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	247	117	1.003	2.271	478	404
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	234	85	558	1.138	390	326
Pemerintah Kota Pekanbaru	461	311	715	3.253	741	619
Pemerintah Kota Dumai	343	233	533	2.030	415	385
TOTAL	4.442	2.228	13.923	35.753	10.033	7.642

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	498	302	3.193	8.201	1.712	1.667
Pemerintah Kab. Agam	200	132	703	3.245	402	293
Pemerintah Kab. Pasaman	201	131	583	1.927	371	249
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	226	162	983	3.537	397	279
Pemerintah Kab. Solok	221	143	822	2.777	322	207
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	226	173	746	3.314	318	221
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	218	178	958	3.041	387	326
Pemerintah Kab. Tanah Datar	198	161	609	2.493	325	334
Pemerintah Kab. Sijunjung	196	144	810	2.473	324	265
Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	164	88	491	845	449	306
Pemerintah Kab. Solok Selatan	130	81	471	1.706	321	419
Pemerintah Kab. Dharmasraya	151	103	565	1.860	209	182
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	233	170	661	2.470	334	303
Pemerintah Kota Bukittinggi	198	189	212	973	375	341
Pemerintah Kota Padang Panjang	144	92	221	795	279	218
Pemerintah Kota Sawahlunto	158	126	264	950	206	219
Pemerintah Kota Solok	161	132	281	900	242	241
Pemerintah Kota Padang	466	411	865	4.190	740	568
Pemerintah Kota Payakumbuh	238	223	309	1.282	236	228
Pemerintah Kota Pariaman	145	92	345	1.189	332	416
TOTAL	4.372	3.233	14.092	48.168	8.281	7.282

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		PELAKSANA	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	341	157	1.283	1.878	627	583
Pemerintah Kab. Bintan	277	170	589	1.244	452	356
Pemerintah Kab. Karimun	337	178	701	1.546	533	420
Pemerintah Kab. Natuna	305	105	649	920	515	309
Pemerintah Kab. Lingga	238	98	726	1.243	411	316
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	201	87	403	689	249	193
Pemerintah Kota Batam	486	275	967	2.319	761	696
Pemerintah Kota Tanjungpinang	224	147	479	1.135	418	450
TOTAL	2.409	1.217	5.797	10.974	3.966	3.323

6. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Riau	0	0	187	250	774	1.272	2.544	3.630	2.156	2.448	25	11
Pemerintah Kab. Kampar	0	0	84	142	187	638	890	1.669	1.278	1.701	4	11
Pemerintah Kab. Bengkalis	0	0	55	75	340	728	1.004	1.718	706	1.237	2	3
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2	1	77	120	330	667	752	1.256	603	855	1	0

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	0	1	86	209	422	846	910	1.319	1.054	1.393	24	39
Pemerintah Kab. Pelalawan	1	0	37	65	263	600	847	1.182	557	616	3	1
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	0	0	73	170	236	595	899	1.574	693	792	1	0
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	0	0	66	117	380	684	1.124	1.908	606	758	2	1
Pemerintah Kab. Siak	0	0	49	83	292	708	1.009	1.473	644	884	1	1
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	2	0	108	240	357	745	597	1.001	662	793	2	13
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	3	1	99	110	291	539	493	629	296	270	0	0
Pemerintah Kota Pekanbaru	0	0	152	240	435	1.061	823	1.531	505	1.343	2	8
Pemerintah Kota Dumai	0	0	123	248	262	644	635	1.169	269	585	2	2
TOTAL	8	3	1.196	2.069	4.569	9.727	12.527	20.059	10.029	13.675	69	90

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1	2	270	697	987	2.011	1.921	3.844	2.205	3.597	19	19

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Agam	0	0	79	224	210	744	394	1.050	622	1.652	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman	0	0	32	70	168	527	406	879	539	798	10	33
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	0	1	175	475	269	987	437	1.044	721	1.458	4	13
Pemerintah Kab. Solok	0	0	53	143	188	615	396	1.045	714	1.291	14	33
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	0	0	49	116	214	768	332	991	676	1.796	19	37
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	0	0	55	114	225	743	462	1.063	821	1.624	0	1
Pemerintah Kab. Tanah Datar	0	0	58	156	219	604	346	922	509	1.305	0	1
Pemerintah Kab. Sijunjung	7	8	285	673	247	763	383	796	408	642	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	63	86	272	409	466	521	302	223	1	0
Pemerintah Kab. Solok Selatan	0	0	45	146	236	677	384	878	257	505	0	0
Pemerintah Kab. Dharmasraya	0	0	44	136	180	614	365	801	336	594	0	0

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	0	0	67	191	254	856	453	1.065	453	831	1	0
Pemerintah Kota Bukittinggi	0	0	44	123	141	411	361	597	238	372	1	0
Pemerintah Kota Padang Panjang	0	0	33	64	125	289	295	463	190	289	1	0
Pemerintah Kota Sawahlunto	0	0	46	107	108	363	258	471	216	354	0	0
Pemerintah Kota Solok	0	0	48	114	159	345	314	490	162	319	1	5
Pemerintah Kota Padang	0	2	197	468	435	1.165	644	1.497	792	2.032	3	5
Pemerintah Kota Payakumbuh	0	0	17	50	129	453	369	710	267	517	1	3
Pemerintah Kota Pariaman	0	1	114	274	225	546	318	543	165	329	0	4
TOTAL	8	14	1.774	4.427	4.991	13.890	9.304	19.670	10.593	20.528	75	154

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	0	0	76	127	467	667	1.150	1.269	551	553	7	2
Pemerintah Kab. Bintan	0	0	101	207	271	484	568	649	377	429	1	1

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Karimun	0	0	90	210	262	494	716	925	502	514	1	1
Pemerintah Kab. Natuna	0	0	64	126	287	427	710	564	408	217	0	0
Pemerintah Kab. Lingga	4	4	234	283	401	572	459	535	277	263	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	0	0	93	148	332	456	292	268	134	97	2	0
Pemerintah Kota Batam	0	0	109	235	302	735	1.056	1.371	744	948	3	1
Pemerintah Kota Tanjungpinang	0	0	55	92	245	462	578	756	241	421	2	1
TOTAL	4	4	822	1.428	2.567	4.297	5.529	6.337	3.234	3.442	16	6

7. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Riau	0	0	484	1.293	1.561	3.077	671	1.340	202	288	0	2
Pemerintah Kab. Kampar	0	0	377	712	1.131	2.358	613	1.161	113	229	0	0
Pemerintah Kab. Bengkalis	0	0	124	385	483	1.287	257	796	41	156	1	5
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	0	0	65	382	304	1.011	141	450	32	64	0	0

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	0	0	41	178	269	846	159	514	36	86	0	0
Pemerintah Kab. Pelalawan	0	0	19	83	211	579	99	307	13	60	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	0	0	107	373	517	1.356	263	684	39	79	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	0	0	77	293	367	1.279	230	597	67	157	2	1
Pemerintah Kab. Siak	0	0	110	379	508	1.239	303	636	63	153	0	0
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	0	0	45	177	218	691	117	351	35	73	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	0	0	30	106	193	438	75	153	11	13	0	0
Pemerintah Kota Pekanbaru	0	0	53	197	176	440	156	489	42	156	0	0
Pemerintah Kota Dumai	0	0	183	500	502	1.148	233	467	64	75	1	2
TOTAL	0	0	1.715	5.058	6.440	15.749	3.317	7.945	758	1.589	4	10

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	0	0	225	634	1.000	2.461	231	764	74	196	0	0

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Agam	0	0	130	572	246	1.051	129	454	32	82	0	0
Pemerintah Kab. Pasaman	0	0	55	232	275	978	97	360	12	19	0	1
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	0	0	124	308	256	849	97	349	19	41	1	0
Pemerintah Kab. Solok	0	0	42	130	177	583	96	468	46	57	1	0
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	0	0	115	330	379	884	127	337	27	73	0	1
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	0	0	148	785	442	1.530	107	504	45	149	0	0
Pemerintah Kab. Tanah Datar	0	0	118	376	185	589	43	266	16	47	0	0
Pemerintah Kab. Sijunjung	0	0	47	199	158	741	59	280	10	35	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	51	141	350	588	146	145	18	13	0	0
Pemerintah Kab. Solok Selatan	0	0	5	10	30	75	29	101	14	22	0	0
Pemerintah Kab. Dharmasraya	0	0	65	287	209	898	67	277	11	45	0	0

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	0	0	78	335	328	1.128	237	623	54	76	1	0
Pemerintah Kota Bukittinggi	0	0	45	118	131	210	54	74	14	9	0	0
Pemerintah Kota Padang Panjang	0	0	24	41	56	125	19	46	7	2	0	0
Pemerintah Kota Sawahlunto	0	0	43	115	135	384	51	129	17	22	0	0
Pemerintah Kota Solok	0	0	14	39	56	168	9	41	0	7	0	0
Pemerintah Kota Padang	0	0	401	816	1.145	1.994	552	857	147	294	0	0
Pemerintah Kota Payakumbuh	0	0	57	130	137	285	42	114	12	16	1	0
Pemerintah Kota Pariaman	0	0	93	121	222	161	79	78	25	30	0	0
TOTAL	0	0	1.880	5.719	5.917	15.682	2.271	6.267	600	1.235	4	2

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	0	0	525	715	1.330	1.331	805	554	221	159	0	0
Pemerintah Kab. Bintan	0	0	175	294	365	524	242	276	55	61	0	0

INSTANSI	USIA 17-20		USIA 21-30		USIA 31-40		USIA 41-50		USIA 51-60		USIA 60+	
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
Pemerintah Kab. Karimun	0	0	144	313	639	914	341	428	80	70	0	1
Pemerintah Kab. Natuna	0	0	64	163	292	457	132	209	14	40	0	1
Pemerintah Kab. Lingga	0	0	165	255	370	512	235	150	47	27	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	0	0	154	303	622	800	197	284	44	39	0	0
Pemerintah Kota Batam	0	0	376	544	1.375	1.599	658	813	172	231	0	0
Pemerintah Kota Tanjungpinang	0	0	121	222	295	457	149	212	18	36	0	0
TOTAL	0	0	1.724	2.809	5.288	6.594	2.759	2.926	651	663	0	2

8. Jumlah PNS Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Riau	12	2	24	2	821	416	7	7	11	8	213	488	146	149	3.050	5.135	1.358	1.386	44	18
Pemerintah Kab. Kampar	9	0	23	7	417	192	1	7	63	73	117	479	30	131	1.457	2.940	323	332	3	0
Pemerintah Kab. Bengkalis	9	0	15	2	531	349	3	7	30	54	109	345	38	76	1.014	2.552	355	374	3	2
Pemerintah Kab.	5	1	19	2	354	170	2	6	41	75	120	504	15	42	1.038	1.906	170	192	1	1

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Indragiri Hulu																				
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	28	2	30	3	518	178	3	5	87	109	136	426	27	89	1.360	2.740	304	255	3	0
Pemerintah Kab. Pelalawan	6	0	3	1	287	121	1	3	53	52	57	272	17	106	1.085	1.719	199	190	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	6	0	10	2	403	271	0	2	42	56	87	323	20	26	1.078	2.273	256	178	0	0
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	10	2	24	5	535	264	3	2	53	52	104	371	15	40	1.166	2.399	268	333	0	0
Pemerintah Kab. Siak	14	0	19	3	414	191	0	2	44	51	92	437	25	44	1.129	2.222	252	199	6	0
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	11	1	12	1	284	184	1	2	41	84	130	378	26	211	1.062	1.764	156	167	5	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	3	0	6	1	225	140	0	2	51	41	77	230	15	50	659	949	145	136	1	0
Pemerintah Kota Pekanbaru	8	2	15	2	328	185	1	4	18	54	102	466	79	96	986	2.885	367	485	13	4
Pemerintah Kota Dumai	4	0	5	0	233	161	2	0	6	11	94	382	30	100	672	1.716	244	277	1	1
TOTAL	125	10	205	31	5.350	2.822	24	49	540	720	1.438	5.101	483	1.160	15.756	31.200	4.397	4.504	80	26

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	21	3	48	7	763	435	8	9	7	13	320	902	101	146	3.043	6.933	1.074	1.707	18	15
Pemerintah Kab. Agam	13	2	48	4	214	114	0	5	17	20	90	510	37	109	736	2.635	149	269	1	2
Pemerintah Kab. Pasaman	5	0	17	0	222	122	0	0	18	13	58	321	26	108	687	1.631	122	112	0	0
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	5	1	34	4	245	133	0	0	35	51	109	583	41	130	995	2.841	142	234	0	1
Pemerintah Kab. Solok	3	2	19	0	210	90	1	12	35	48	73	403	27	106	812	2.275	183	190	2	1
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	4	3	27	4	188	102	3	14	24	70	70	591	19	104	759	2.582	193	237	3	1
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	1	1	19	3	231	159	1	4	26	45	66	590	24	83	950	2.398	244	262	1	0
Pemerintah Kab. Tanah Datar	12	4	19	5	146	94	0	1	20	21	108	549	31	88	680	2.068	115	158	1	0
Pemerintah Kab. Sijunjung	3	1	13	0	260	121	0	4	12	33	120	555	44	136	727	1.782	150	250	1	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	6	0	12	0	244	127	0	1	16	14	97	229	18	14	589	743	122	111	0	0
Pemerintah Kab. Solok Selatan	2	0	1	1	115	116	1	3	11	22	82	356	15	56	591	1.537	102	114	2	1
Pemerintah Kab. Dharmasraya	7	3	5	0	108	73	2	4	20	16	79	393	16	80	528	1.394	159	182	1	0
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	1	1	5	1	148	83	1	2	26	35	102	308	21	103	769	2.186	151	224	4	0
Pemerintah Kota Bukittinggi	34	2	14	0	174	61	1	1	6	5	61	284	31	28	334	916	130	206	0	0
Pemerintah Kota Padang Panjang	6	1	12	1	123	44	1	3	5	3	66	238	21	48	310	652	97	114	3	1
Pemerintah Kota Sawahlunto	3	1	2	2	122	65	3	1	3	8	54	224	20	38	333	778	87	178	1	0
Pemerintah Kota Solok	3	0	6	0	91	32	0	1	4	3	42	168	22	48	336	782	177	235	3	4
Pemerintah Kota Padang	34	1	36	2	424	193	1	3	15	35	152	907	43	119	1.065	3.310	298	596	3	3
Pemerintah Kota Payakumbuh	7	1	6	1	156	77	0	0	7	12	73	386	37	69	347	957	149	230	1	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Kota Pariaman	2	1	2	1	90	44	1	2	6	14	88	334	25	57	485	1.098	122	146	1	0
TOTAL	172	28	345	36	4.274	2.285	24	70	313	481	1.910	8.831	619	1.670	15.076	39.498	3.966	5.755	46	29

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	6	0	4	0	216	96	2	2	3	2	140	247	58	65	1.346	1.805	442	395	34	6
Pemerintah Kab. Bintan	4	0	9	0	280	133	0	4	28	22	152	417	37	51	694	1.023	112	120	2	0
Pemerintah Kab. Karimun	9	2	26	9	367	181	2	4	61	45	158	375	36	45	699	1.334	208	148	5	1
Pemerintah Kab. Natuna	6	1	24	0	330	137	0	1	21	10	108	280	33	25	855	828	92	52	0	0
Pemerintah Kab. Lingga	5	0	11	4	201	95	1	0	27	46	144	382	13	15	916	1.062	57	53	0	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	2	0	4	0	124	60	0	1	15	19	68	212	29	25	508	589	101	63	2	0
Pemerintah Kota Batam	11	1	11	2	384	117	2	1	14	17	114	515	71	87	1.306	2.292	298	256	3	2
Pemerintah Kota	3	4	6	2	252	128	2	0	7	21	82	324	38	41	603	1.052	125	159	3	1

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tanjung pinang																				
TOTAL	46	8	95	17	2.154	947	9	13	176	182	966	2.752	315	354	6.927	9.985	1.435	1.246	49	10

9. Jumlah PPPK Daerah Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

a) Wilayah Provinsi Riau

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Riau	0	0	27	0	0	180	76	8.489	146	0	0	0	27	0	0	180	76	8.489	146	0
Pemerintah Kab. Kampar	8	12	1.223	0	0	424	45	4.837	145	0	8	12	1.223	0	0	424	45	4.837	145	0
Pemerintah Kab. Bengkalis	0	0	46	0	0	463	32	2.787	207	0	0	0	46	0	0	463	32	2.787	207	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	0	0	6	0	0	212	5	2.175	51	0	0	0	6	0	0	212	5	2.175	51	0
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	0	0	6	0	0	27	8	2.062	26	0	0	0	6	0	0	27	8	2.062	26	0
Pemerintah Kab. Pelalawan	0	0	0	0	0	37	13	1.284	37	0	0	0	0	0	0	37	13	1.284	37	0
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	0	0	91	0	0	429	26	2.752	120	0	0	0	91	0	0	429	26	2.752	120	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	0	0	43	0	0	480	48	2.336	163	0	0	0	43	0	0	480	48	2.336	163	0
Pemerintah Kab. Siak	0	0	328	0	0	564	47	2.318	134	0	0	0	328	0	0	564	47	2.318	134	0
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	0	0	17	0	0	154	5	1.495	36	0	0	0	17	0	0	154	5	1.495	36	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0	235	6	730	48	0	0	0	0	0	0	235	6	730	48	0
Pemerintah Kota Pekanbaru	0	2	55	0	0	69	21	1.543	19	0	0	2	55	0	0	69	21	1.543	19	0
Pemerintah Kota Dumai	13	0	812	0	0	653	43	1.569	85	0	13	0	812	0	0	653	43	1.569	85	0
TOTAL	21	14	2.654	0	0	3.927	375	34.377	1.217	0	21	14	2.654	0	0	3.927	375	34.377	1.217	0

b) Wilayah Provinsi Sumatera Barat

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	0	0	17	0	0	326	66	5.083	93	0	0	0	17	0	0	326	66	5.083	93	0
Pemerintah Kab. Agam	12	0	154	0	0	313	17	2.134	66	0	12	0	154	0	0	313	17	2.134	66	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Kab. Pasaman	0	0	12	0	0	341	31	1.565	80	0	0	0	12	0	0	341	31	1.565	80	0
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	0	2	224	0	0	127	8	1.677	6	0	0	2	224	0	0	127	8	1.677	6	0
Pemerintah Kab. Solok	2	22	67	0	1	139	12	1.335	22	0	2	22	67	0	1	139	12	1.335	22	0
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	0	1	220	0	0	106	9	1.926	11	0	0	1	220	0	0	106	9	1.926	11	0
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	0	0	31	0	0	528	73	2.931	146	1	0	0	31	0	0	528	73	2.931	146	1
Pemerintah Kab. Tanah Datar	1	1	41	0	0	201	11	1.358	27	0	1	1	41	0	0	201	11	1.358	27	0
Pemerintah Kab. Sijunjung	0	0	9	0	0	277	14	1.161	68	0	0	0	9	0	0	277	14	1.161	68	0
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2	11	186	0	0	395	15	803	40	0	2	11	186	0	0	395	15	803	40	0
Pemerintah Kab. Solok Selatan	0	0	11	0	0	3	0	272	0	0	0	0	11	0	0	3	0	272	0	0
Pemerintah Kab. Dharmasraya	0	0	53	0	0	438	44	1.184	140	0	0	0	53	0	0	438	44	1.184	140	0
Pemerintah Kab.	0	6	670	0	0	164	29	1.906	85	0	0	6	670	0	0	164	29	1.906	85	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pasaman Barat																				
Pemerintah Kota Bukittinggi	5	1	160	0	0	95	4	343	47	0	5	1	160	0	0	95	4	343	47	0
Pemerintah Kota Padang Panjang	0	4	64	0	0	100	1	130	21	0	0	4	64	0	0	100	1	130	21	0
Pemerintah Kota Sawahlunto	11	0	107	0	0	245	21	463	49	0	11	0	107	0	0	245	21	463	49	0
Pemerintah Kota Solok	0	0	0	0	0	66	5	249	14	0	0	0	0	0	0	66	5	249	14	0
Pemerintah Kota Padang	81	96	1.281	0	0	625	24	4.026	73	0	81	96	1.281	0	0	625	24	4.026	73	0
Pemerintah Kota Payakumbuh	0	0	112	0	0	166	1	468	47	0	0	0	112	0	0	166	1	468	47	0
Pemerintah Kota Pariaman	4	9	364	0	0	25	2	405	0	0	4	9	364	0	0	25	2	405	0	0
TOTAL	118	153	3.783	0	1	4.680	387	29.419	1.035	1	118	153	3.783	0	1	4.680	387	29.419	1.035	1

c) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pemerintah Provinsi	39	86	1.484	1	0	351	50	3.552	77	0	39	86	1.484	1	0	351	50	3.552	77	0

INSTANSI	SD		SMP		SMA		D-I		D-II		D-III		D-IV		Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kepulauan Riau																				
Pemerintah Kab. Bintan	39	0	671	0	0	263	10	973	36	0	39	0	671	0	0	263	10	973	36	0
Pemerintah Kab. Karimun	8	6	996	0	0	276	20	1.597	27	0	8	6	996	0	0	276	20	1.597	27	0
Pemerintah Kab. Natuna	1	7	275	0	0	310	15	701	63	0	1	7	275	0	0	310	15	701	63	0
Pemerintah Kab. Lingga	11	16	801	0	0	242	6	652	33	0	11	16	801	0	0	242	6	652	33	0
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	27	0	1.139	0	0	173	22	1.060	22	0	27	0	1.139	0	0	173	22	1.060	22	0
Pemerintah Kota Batam	55	19	1.374	0	0	590	76	3.512	142	0	55	19	1.374	0	0	590	76	3.512	142	0
Pemerintah Kota Tanjungpinang	3	6	400	0	0	179	6	870	46	0	3	6	400	0	0	179	6	870	46	0
TOTAL	183	140	7.140	1	0	2.384	205	12.917	446	0	183	140	7.140	1	0	2.384	205	12.917	446	0

10. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ASN

INSTANSI	JFT NAKES		JFT GURU		JFT TEKNIS		TOTAL JFT		
	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	ASN
Pemerintah Provinsi Riau	1.143	140	5.708	8.415	1.406	115	8.257	8.670	16.927
Pemerintah Kab. Kampar	1.312	617	3.266	3.980	529	472	5.107	5.069	10.176
Pemerintah Kab. Bengkalis	952	647	2.488	2.568	323	155	3.763	3.370	7.133
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	775	220	1.940	2.131	312	16	3.027	2.367	5.394

INSTANSI	JFT NAKES		JFT GURU		JFT TEKNIS		TOTAL JFT		
	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	ASN
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	1.022	31	2.931	2.034	499	12	4.452	2.077	6.529
Pemerintah Kab. Pelalawan	632	80	1.766	1.272	423	5	2.821	1.357	4.178
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	760	582	2.406	2.492	421	248	3.587	3.322	6.909
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	911	450	2.504	2.159	348	120	3.763	2.729	6.492
Pemerintah Kab. Siak	877	319	2.184	1.908	337	249	3.398	2.476	5.874
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	978	202	1.787	1.453	509	45	3.274	1.700	4.974
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	424	70	1.035	666	237	17	1.696	753	2.449
Pemerintah Kota Pekanbaru	979	58	2.400	1.412	589	62	3.968	1.532	5.500
Pemerintah Kota Dumai	737	600	1.311	1.063	515	16	2.563	1.679	4.242
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1.673	83	8.575	4.985	1.146	57	11.394	5.125	16.519
Pemerintah Kab. Agam	937	202	2.614	2.039	397	53	3.948	2.294	6.242
Pemerintah Kab. Pasaman	654	238	1.576	1.475	280	13	2.510	1.726	4.236
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	1.114	12	2.579	1.515	827	71	4.520	1.598	6.118
Pemerintah Kab. Solok	727	145	2.468	1.228	404	43	3.599	1.416	5.015
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	1.015	12	2.691	1.678	354	237	4.060	1.927	5.987
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	1.011	824	2.636	2.811	352	49	3.999	3.684	7.683
Pemerintah Kab. Tanah Datar	797	166	1.969	1.272	336	80	3.102	1.518	4.620
Pemerintah Kab. Sijunjung	989	301	1.521	1.086	773	20	3.283	1.407	4.690
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	336	395	761	660	239	8	1.336	1.063	2.399
Pemerintah Kab. Solok Selatan	575	0	1.397	257	205	28	2.177	285	2.462
Pemerintah Kab. Dharmasraya	757	396	1.375	1.025	293	74	2.425	1.495	3.920
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	768	299	2.047	1.823	316	85	3.131	2.207	5.338
Pemerintah Kota Bukittinggi	315	93	584	261	286	8	1.185	362	1.547
Pemerintah Kota Padang Panjang	406	8	406	102	204	25	1.016	135	1.151

INSTANSI	JFT NAKES		JFT GURU		JFT TEKNIS		TOTAL JFT		
	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	ASN
Pemerintah Kota Sawahlunto	425	96	535	209	254	210	1.214	515	1.729
Pemerintah Kota Solok	287	88	487	244	407	1	1.181	333	1.514
Pemerintah Kota Padang	1.264	383	2.936	3.007	855	202	5.055	3.592	8.647
Pemerintah Kota Payakumbuh	563	40	707	370	321	92	1.591	502	2.093
Pemerintah Kota Pariaman	536	0	738	176	260	15	1.534	191	1.725
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	478	202	1.803	2.140	880	3	3.161	2.345	5.506
Pemerintah Kab. Bintan	597	204	894	600	342	11	1.833	815	2.648
Pemerintah Kab. Karimun	627	224	1.193	1.048	427	221	2.247	1.493	3.740
Pemerintah Kab. Natuna	437	122	709	457	423	80	1.569	659	2.228
Pemerintah Kab. Lingga	445	288	1.068	349	456	34	1.969	671	2.640
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	378	109	459	479	255	52	1.092	640	1.732
Pemerintah Kota Batam	871	206	1.893	2.694	522	295	3.286	3.195	6.481
Pemerintah Kota Tanjungpinang	433	148	733	578	448	173	1.614	899	2.513
TOTAL	30.917	9.300	79.080	66.121	18.710	3.772	128.707	79.193	207.900